

Sejarah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR

Sejarah panjang pembangunan sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dipisahkan dari perjalanan kelembagaan pemerintah daerah dalam menangani urusan pertanian secara struktural dan sistematis. Dalam konteks ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memainkan peran sentral sejak awal pembentukan provinsi ini, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan pertanian, hingga pembinaan terhadap petani dan pelaku usaha pertanian.

Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Seiring dengan pembentukan provinsi, kebutuhan akan lembaga-lembaga teknis yang menangani pembangunan sektor-sektor strategis menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah sektor pertanian, yang pada saat itu menjadi tulang punggung utama perekonomian masyarakat NTT yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan.

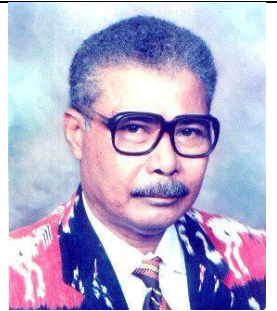
Untuk merespons kebutuhan tersebut, pada tahun 1973 dibentuklah lembaga yang diberi nama Dinas Pertanian Rakyat sebagai bagian dari perangkat pelaksana otonomi daerah di bawah kendali langsung Gubernur. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk merancang, mengelola, dan melaksanakan berbagai program/kegiatan pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan teknologi pertanian sederhana yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklim NTT.

Sepanjang sejarahnya, Dinas Pertanian di NTT mengalami berbagai perubahan struktur organisasi dan nomenklatur sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan pembangunan daerah. Pada periode 1976 hingga 1981, di bawah kepemimpinan Ir. A. Pelokilla, dinas mulai mengalami modernisasi dalam sistem pelayanan dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan. Fokus mulai diarahkan tidak hanya pada produksi pangan, tetapi juga pada aspek diversifikasi tanaman dan pembinaan teknis kepada petani.

Selanjutnya, pada periode 1987 hingga awal tahun 2000-an, organisasi ini berubah nama menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTT. Perubahan ini merupakan bentuk spesialisasi tugas agar pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura dapat lebih terfokus dan efektif. Selama kurun waktu ini pula, program-program seperti Gerakan Intensifikasi Pangan (GIP) dan peningkatan swasembada beras mulai diterapkan secara luas. Dengan diberlakukannya era otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999, terjadi gelombang besar perubahan struktur kelembagaan di seluruh Indonesia, termasuk di NTT. Tahun 2009 menandai babak baru dengan dilakukannya penggabungan antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Perkebunan, menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-subsektor tanaman pangan dan komoditas perkebunan, yang memiliki potensi besar seperti kopi, kakao, dan kemiri di beberapa wilayah pegunungan NTT.

Struktur organisasi terus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Selama dua dekade berikutnya, dinas ini menjalankan berbagai program ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, penyuluhan berbasis partisipatif, serta pembangunan jaringan irigasi kecil guna mendukung pertanian lahan kering yang menjadi ciri khas NTT. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTT kembali melakukan penataan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan layanan publik. Melalui Peraturan Gubernur dan penyesuaian regulasi nasional, dilakukan penggabungan tiga organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Hasilnya, terbentuklah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku efektif mulai Agustus 2019. Penggabungan ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan pertanian. Dinas ini tidak hanya menangani produksi, tetapi juga mengurus pasca panen, pengolahan hasil, distribusi, pemasaran, dan keamanan pangan. Tujuan besarnya adalah mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mendukung visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

Berikut adalah nama-nama Kepala yang pernah memimpin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

No.	Nama Kepala Dinas	Periode Jabatan (Tahun)	Nomenklatur Dinas	Foto
1.	Bapak Vela Valafon	1973-1975	Dinas Pertanian Rakyat	
2.	Bapak Suwikno	1975	Dinas Pertanian Rakyat	
3.	Bapak Ir. A. Pelokilla	1976-1981	Dinas Pertanian Rakyat	
4.	Bapak Ir. Marsono	1981-1986	Dinas Pertanian Rakyat	
5.	Ir. Dominikus Ndarung	1987-1992	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTT	
6.	Ir. Umbu Purawoha	1992-1997	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTT	

7.	Ir. Felix Morghen	1997-2001	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTT	
8.	Ir. Petrus Muga	2001-2009	Dinas Pertanian TPH bergabung dengan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	
9.	Drs. Anderias Jehalu	2009-2010	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	

10.	Drs. Saverius Banggung	2010-2011	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	
11.	Ir. Yohanes Tay, MM	2011-2019	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, pada tahun 2017 berganti menjadi Dinas Pertanian Provinsi NTT	
12	Ir. Miqdonth S. Abolla, M.Si	Februari-Juli 2019	Dinas Pertanian bergabung dengan Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	

13.	Ir. Yohanes Oktovianus, MM	Agustus 2019– Agustus 2020	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
14.	Lecky Frederich Koli, STP	Agustus 2020 – Maret 2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
15	Joaz Bily Oemboe Wanda , SP	Mei 2025-Sekarang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	

